

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian sebagaimana yang telah termuat pada bagian terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemekaran kecamatan Mataru memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan Mataru.

Percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang disimpulkan dalam penelitian ini mencakup empat aspek yaitu:

1. Pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintah seperti semakin terfokusnya aparatur pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, serta terselenggaranya koordinasi yang baik antar aparatur pemerintah kecamatan.
2. Pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan potensi wilayah serta meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat.
4. Selanjutnya bahwa pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan seperti direkrutnya tenaga kerja masyarakat untuk membangun

infrastruktur di kecamatan, pembangunan sarana lainnya melalui implementasi proyek-proyek dan semangat masyarakat untuk lebih membangun daerahnya dengan menggiatkan kearifan tradisional seperti gotong royong dalam membangun kecamatan.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisa dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Dengan melihat hasil analisis dari penelitian ini dari variabel dampak terhadap pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan Mataru maka agar dapat memperoleh peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, peningkatan percepatan pembangunan masyarakat, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan potensi wilayah dan peningkatan masyarakat dalam pembangunan harus teris diperhatikan dan ditingkatkan. Dengan demikian keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan Mataru dapat terwujud.
2. Kepada pemerintah kabupaten Alor, penelitian ini dipedomani dalam mengetahui tingkat keberhasilan pemekaran kecamatan sehingga dapat membenahi kembali hal-hal yang dibutuhkan masyarakat desa dalam pembangunan masyarakatnya terutama menyangkut seberapa jauh pemerintah kecamatan telah berhasil mengaktualisasikan kewenangan yang diberikan kepada Camat dapat berpengaruh kepada tugas-tugas dalam pembangunan masyarakat.

3. Apabilah dalam perkembangannya timbul berbagai permasalahan seperti infrastruktur yang belum memadai, permasalahan batas wilayah dan lain sebagainya, pemerintah Daerah diharapkan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa berjalan sesuai harapan.
4. Kecamatan mataru juga masuk dalam wilayah perbatasan NEGARA TIMUR LESTE. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat harus ada perhatian terhadap kondisi tersebut, untuk itu melihat kondisi di kecamatan mataru seperti sarana dan prasarana karena kecamatan mataru juga salah satu wilayah yang bagian depan dari NKRI. Kemajuan kecamatan mataru juga kemajuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Djohermansyah Djohan, (2005), Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Haris Syamsudin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan.

Daerah, Yayasan Obor, Jakarta

Djohermansyah Djohan (2005), Menggambar Pemekaran Wilayah Yang di sebabkan oleh Otonomi Daerah

Dermawan (2008), Menggambarkan Dampak Positif terhadap Pemekaran Daerah

G T Liang (2003), Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI, Liberti Yogyakarta.

Haw Widjaja (Palembang, Desember 2000) otonomi daerah dan daerah otonomi

Hari Subarno, (2008), Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafik

J. Kaloh (januari 2007), satu solusi dalam menjawab kebutuhan local dalam menjawab tantangan gelobal

Josef Riwu Kaho (Yogyakarta, 1 September 1988) prospek otonomi daerah

Lay (2005), Pendekatan Pelayanan Publik

Lonsdale (1994), Pelayanan Publik

Wijaya (2006), Menggambarkan Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah

Peter Mahmud Marzuki, (2010), Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta